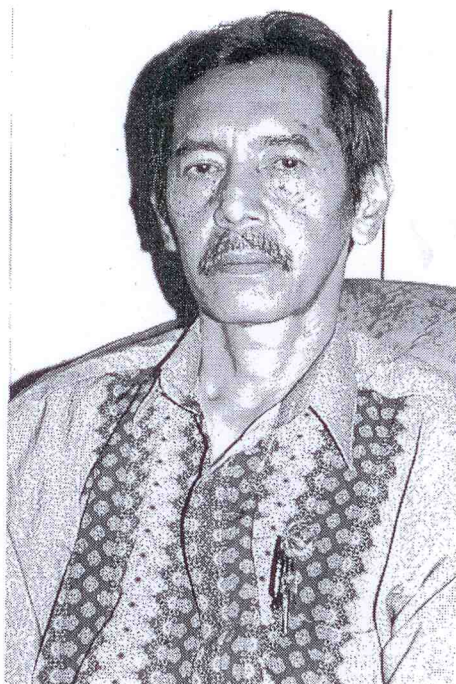


DKP Bantah Tidak Paham Peraturan



Drs H Dailami MSi

Sambas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sambas Drs H Dailami MSi membantah tuduhan tidak memahami peraturan terkait kartu nelayan. Apalagi dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DKP Kabupaten Sambas memang belum ada kegiatan penyediaan kartu nelayan tersebut.

"Tuduhan itu tidak benar, apalagi ada kesan sangat meojokan institusi DKP," tegasnya.

Penegasan itu terkait Short Message Service (SMS) Interaktif dari 08979835624 pada tanggal 2 Desember 2011 pukul 17.37 (Equator, 5 Desember 2011), yang berbunyi, "Membaca SMS Anda 085387079796 berjudul Kartu Nelayan (1/12). Jika Anda masyarakat nelayan atau pegawai DKP kabupaten/kota, sebaiknya Anda tidak perlu berharap, dan tidak perlu Anda pinta. Tidak ada kartu nelayan untuk Anda. DKP Bengkayang dan DKP Sambas yang menerima kartu nelayan, mereka itu tidak paham peraturan atau kekurangan kegiatan proyek. Jika mereka paham, nanti mereka sendiri yang bermasalah, baik terhadap nelayannya sendiri maupun terhadap pemeriksaan Inspektur, bahkan BPK Kalbar karena tidak prosedur dan banyak penyimpangan."

Dailami mengatakan, pihak yang menuding institusinya kemungkinan tidak paham dengan permasalahan yang sebenarnya. "Atau sengaja ingin memperkeruh situasi," ujar Dailami yang telah bekerja di Dinas Perikanan sejak tahun 1977 ini.

Ia menegaskan, bahwa RKA DKP Kabupaten Sambas hingga saat ini belum memiliki kegiatan penyediaan kartu nelayan. "Jadi dimana yang menyimpang dan tidak sesuai prosedur maupun peraturan. Saya siap dilakukan pengecekan ke kantor saya," pungkasnya. (edo)